



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LILIK KURNIAWAN**
2. Jabatan : **DEPUTI**
3. NHK : **405582**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.807.306.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.843.830.000
2. Tanah Seluas 347 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 179.061.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/95 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 138.415.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m2/250 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 256.000.000
5. Tanah Seluas 7.000 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/90 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 270.000.000

1. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 229.360.500



D. SURAT BERHARGA	Rp.	10.035.244.700
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.238.278.131
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	19.580.189.331
III. HUTANG	Rp.	40.455.184
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	19.539.734.147

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.